

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 216/PDT.G/2023/PN TJK TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK

Oleh:

LINTANG SABRANG KUMALA NING RATIH

Penguasaan tanah tanpa hak terjadi ketika seseorang menguasai tanah milik orang lain tanpa izin sehingga merugikan pemilik tanah. Pemilik tanah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Seperti pada perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penguasaan tanah tanpa hak. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kasus posisi, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 216/PDT.G/2023/PN TJK.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif dengan tipe studi kasus. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kasus posisi dari putusan tersebut yaitu Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara tidak sah tanpa dasar hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 216/PDT.G/2023/PN TJK, Hakim mempertimbangkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat tanpa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terbukti sebagai penguasaan tanah tanpa hak dan tidak sah menurut hukum. Akibat hukum dari Putusan Nomor 216/PDT.G/2023/PN TJK yaitu Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk mengganti kerugian dengan mengosongkan objek sengketa, mengembalikan fisik objek sengketa dalam keadaan semula, dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng serta Para Turut Tergugat wajib tunduk terhadap seluruh isi putusan tersebut.

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Sertifikat Tanah

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 216/PDT.G/2023/PN TJK ON UNLAWFUL ACTS IN UNLAWFUL LAND OCCUPATION

By:

LINTANG SABRANG KUMALA NING RATIH

Unlawful land occupation occurs when someone occupies land that belongs to someone else without permission, thus causing harm to the rightful land owner. The aggrieved landowner can file a unlawful acts lawsuit to the court. As in the case at the Tanjung Karang District Court regarding a unlawful acts lawsuit over the unlawful occupation of land. The issues to be studied in this research are the case position, the legal considerations of the Panel of Judges in deciding the case, and the legal consequences of Tanjung Karang District Court Decision Number 216/PDT.G/2023/PN TJK.

The type of research used in this study is normative legal research. The type of research used descriptive research type and the problem approach used is normative problem approach with case study type. Data analysis is carried out qualitatively.

The results of the research and discussion shows that the position case of the verdict is that the Plaintiffs feel aggrieved because the Defendants have unlawfully occupied the disputed land without legal basis. The basis for the judge's consideration in Decision Number 216/PDT.G/2023/PN TJK, the judge's considered that the occupation of the land by the Defendants without proof of ownership of a Certificate of Ownership (SHM) was proven to be an occupation of land without rights and was not legal according to the law. The legal consequences of Decision Number 216/PDT.G/2023/PN TJK are that Defendants I and II are obliged to compensate for damages by vacating the disputed object, returning the physical object in dispute in kind or to its original state, and paying the court costs on a jointly and severally basis as well as the Co-Defendants must comply with the entire contents of the decision.

Keywords: Land Ownership, Unlawful Acts, Land Certificates

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 216/PDT.G/2023/PN TJK
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK**

(Skripsi)

Oleh

**LINTANG SABRANG KUMALA NING RATIH
NPM 2112011279**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025